

Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Kerinci

Satya Anggi Perman, Syahniar & Daharnis

Universitas Negeri Padang, Universitas Negeri Padang & Universitas Negeri Padang

Email: Satyaanggipermana@gmail.com

Abstract

SMAN 4 Kerinci (Senior High School) is one of favorite schools which has potential to conduct guidance and counseling service optimally. This is supported by its conducive condition and the sufficient number of the teachers. All of the teachers have qualification in Guidance of Counseling education. In addition, this school has adequate facilities. Unfortunately, the phenomena in the field indicated that the guidance and counseling service was not effectively conducted. This research was intended to describe the implementation of Guidance and Counseling service in that school. This was a qualitative research which applied phenomenology approach. The informants of the research were the school fellows including headmaster, vice headmaster, guidance and counseling teachers, subject teachers and classroom teachers. The data were collected through observation, interview and documentation study. To check the trustworthiness of the data, there were four conducted (1) credibility, (2) transferability, (3) dependability, and (4) conformability. The data gathered were analyzed by (1) data reduction, (2) displaying the data and, (3) drawing conclusion/verifying. The research findings showed that the Guidance and Counseling service was not yet conducted optimally at SMAN 4 Kerinci. The cooperation between Guidance and Counseling Teachers with other school fellows was not yet established. This research concluded that the conducive atmosphere, the availability of sufficient qualified teachers, the adequate number of school fellows and the availability of sufficient facilities unless they were supported by good cooperation among related parties, the Guidance and Counseling service would not be optimally accomplished. Based on these conclusions, it was suggested: (1) the Guidance and Counseling teachers to be professional in carrying out their duties and responsibility and to be able to cooperate with other school fellows. and (2) the school fellows to understand their roles in implementing Guidance and Counseling activities at school and be able to get involved actively in.

Keywords: *the Implementation, Guidance and Counseling, Cooperation*

Copyright ©2014 Universitas Negeri Padang All rights reserved

PENDAHULUAN

Pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan dan konseling di sekolah diawali dari studi kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, evaluasi, analisis, laporan serta tindak lanjut terhadap hasil layanan. Dalam praktik pelaksanaan di lapangan, rentetan dari setiap tahap layanan tersebut menuntut profesionalitas dan kompetensi dari Guru BK.

Di tengah semakin baiknya perhatian pemerintah dalam mengokohkan keberadaan bimbingan dan konseling di instansi pendidikan, pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah menjadi tantangan tersendiri bagi Guru BK sebagai pelaksana utama dalam kegiatan tersebut. Profesionalitas Guru BK sangat dituntut dalam melaksanakan pelayanan BK yang optimal bagi peserta didik seiring dengan semakin diakuinya keberadaan bimbingan dan konseling di instansi pendidikan.

Sebagai pendidik profesional, Guru BK bukan hanya dituntut melaksanakan tugasnya secara profesional, tapi juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan profesional. Jika Guru BK memiliki profesionalitas yang tercermin dari kompetensi, kemahiran, kecakapan atau keterampilan yang memiliki standar mutu atau norma etik tertentu, maka dalam praktik pelaksanaan kegiatan layanan tersebut, Guru BK diharapkan dapat menyelenggarakan pelayanan yang optimal kepada peserta didik.

Penyelenggaraan kegiatan BK di sekolah juga tidak terlepas dari keadaan fasilitas penunjang kegiatan tersebut. Kecukupan fasilitas BK yang dimiliki sekolah seperti ruang BK, ruangan konseling serta sarana dan prasarana penunjang lainnya, turut mempengaruhi efektifitas dari pelaksanaan layanan yang diberikan kepada peserta didik. Apabila di suatu sekolah memiliki jumlah Guru BK yang cukup serta berkualifikasi di bidangnya, ditunjang fasilitas yang memadai, maka sekolah tersebut memiliki potensi untuk melaksanakan pelayanan BK yang optimal.

Berdasarkan grand tour yang dilakukan di salah satu sekolah menengah unggulan di kabupaten Kerinci, yakni Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Kerinci dengan status akreditasi "A", sebagai salah satu sekolah unggulan, sekolah ini memiliki potensi yang memadai untuk menyelenggarakan kegiatan bimbingan dan konseling, seperti kecukupan personel utama penyelenggara kegiatan BK yang berkualifikasi di bidangnya, serta fasilitas penunjang yang juga memadai. Potensi seperti ini sangat jarang dimiliki oleh SMA lain yang berada di Kabupaten Kerinci.

Fenomena unik di sekolah ini mulai terlihat ketika peneliti menggali informasi dari sebagian siswa mengenai pelaksanaan layanan BK di sekolah tersebut, mereka mengemukakan bahwa pemberian layanan oleh Guru BK masih kurang dirasakan. Siswa-siswi tersebut menyatakan bahwa jarang siswa yang datang ke ruang konseling untuk mendapatkan layanan dan permasalahan siswa banyak ditangani oleh wali kelas dan guru mata pelajaran.

Berdasarkan pengamatan, dalam kegiatan sehari-hari, interaksi Guru BK dengan siswa masih jarang terlihat, baik itu di lapangan maupun dalam pelaksanaan kegiatan BK. Aktivitas Guru BK banyak terlihat dilakukan di ruang BK saja, interaksi Guru BK dengan personel sekolah dalam pelaksanaan kegiatan BK belum nampak di lapangan, sementara praktik pelaksanaan layanan yang dilakukan secara langsung masih belum terlihat. Dari fenomena yang nampak memberi kesan bahwa ada ketimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan layanan BK di sekolah ini bila dilihat dari potensi yang dimiliki dengan keadaan yang terlihat di lapangan.

Bila dilihat secara keseluruhan, jumlah Guru BK dengan latar belakang pendidikan berkualifikasi akademik (S-1) bimbingan dan konseling yang cukup, didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, seharusnya memperlihatkan kesan optimalnya pelaksanaan layanan BK di SMAN 4 Kerinci. Namun fenomena yang terlihat di lapangan malah menggambarkan indikasi yang memberi kesan kurang efektifnya pelaksanaan layanan BK di sekolah tersebut. Fenomena ini tentu menimbulkan pertanyaan dan keunikan tersendiri untuk diteliti.

METODOLOGI

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di SMAN 4 Kerinci dimulai dari need assessment, perencanaan, kegiatan, evaluasi, analisis, pelaporan dan tindak lanjut, serta mendeskripsikan bagaimana kerjasama Guru BK dengan personel sekolah lainnya dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling.

Informan dalam penelitian ini adalah personel sekolah yang meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, Guru BK, guru mata pelajaran dan wali kelas. Pemilihan informan tersebut didasarkan atas karakteristik elemen yang diperlukan, informan yang dipilih benar-benar menguasai permasalahan dan siap memberikan informasi kepada peneliti.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik menjamin keabsahan data penelitian meliputi empat tahapan yaitu (1) Uji kepercayaan (credibility) (2) Uji keteralihan (transferability) (3) Uji kebergantungan (dependability) (4) Uji kepastian (confirmability). Adapun Kegiatan analisis data dilakukan melalui proses (1) reduksi data (data reduction), (2) data display (display data), dan (3) penarikan kesimpulan (verification).

HASIL

Berdasarkan temuan di lapangan, maka dapat dikemukakan hasil penelitian sebagai berikut:

Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling oleh Guru BK di SMAN 4 Kerinci

- 1. Pelaksanaan studi kebutuhan (*need assessment*)**

Kegiatan *need assessment* di SMAN 4 Kerinci dilakukan oleh Guru BK dengan pengamatan langsung terhadap kondisi siswa, mengacu pada permasalahan yang umum terjadi dan informasi yang di berikan oleh wali kelas dan guru mata pelajaran. Sementara penggunaan sosiometri, AUM, leger nilai, raport serta kegiatan pendukung lainnya belum dimanfaatkan dalam kegiatan *need assessment*.
- 2. Perencanaan program BK**

Program BK dirancang berdasarkan pada kegiatan *need assessment* yang telah dilaksanakan, walaupun *need assessment* tersebut belum lengkap dan mendalam.
- 3. Pelaksanaan kegiatan layanan BK**

Pelaksanaan layanan BK di SMAN 4 Kerinci belum bisa dilaksanakan di kelas, karena terkendala belum adanya jam masuk kelas yang diberikan pihak sekolah. Pelaksanaan layanan yang memungkinkan dilaksanakan di luar kelas belum dilaksanakan oleh Guru BK di lapangan.
- 4. Pelaksanaan evaluasi, analisis, dan tindak lanjut**

Pelaksanaan evaluasi, analisis, dan tindak lanjut terhadap layanan BK di SMAN 4 Kerinci belum terlaksana. Hal ini dikarenakan belum dilaksanakannya kegiatan layanan BK sesuai dengan program yang telah dirancang.
- 5. Laporan kegiatan BK**

Pelaporan kegiatan layanan BK di SMAN 4 Kerinci memuat rancangan program layanan dan uraian dari setiap bentuk layanan yang akan diberikan. Laporan yang disusun juga berisikan usulan kepada pihak sekolah agar memberikan dukungan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan BK.

Kerjasama Guru BK dengan personel sekolah dalam melaksanakan layanan BK

- 1. Kerjasama Guru BK dengan Kepala Sekolah**
 - a. Kerjasama dalam memfasilitasi sarana dan prasarana BK

Kerjasama Guru BK dengan kepala sekolah dalam pengadaan sarana dan prasarana BK belum terlaksana dengan baik. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan BK belum sepenuhnya terpenuhi.
 - b. Kerjasama dalam memberikan waktu untuk pelayanan BK

Kerjasama Guru BK dengan kepala sekolah dalam pengadaan jam masuk kelas untuk pemberian layanan BK di SMAN Kerinci tidak terjalin dengan baik. Hal ini terlihat dari tidak adanya jam pelayanan BK tertera dalam roster/daftar pelajaran. Guru BK tidak dilibatkan sejak awal dalam mempertimbangkan kebijakan menyangkut pengadaan waktu untuk pemberian layanan di kelas.
 - c. Kerjasama dalam berkonsultasi tentang kendala dan hambatan dalam BK

Kerjasama Guru BK dengan kepala sekolah dalam berkonsultasi tentang kendala dan hambatan dalam BK terjalin dengan baik. Kepala sekolah memberikan kesempatan kepada Guru BK untuk berkonsultasi guna mencari solusi dari kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan konseling.
 - d. Kerjasama dalam mengevaluasi kegiatan layanan BK

Kerjasama Guru BK dengan kepala sekolah dalam mengevaluasi kegiatan BK belum terlaksana. Hal ini dikarenakan belum berjalannya kegiatan layanan BK di sekolah.

- e. Kerjasama dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan BK

Kerjasama Guru BK dengan kepala sekolah dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan BK terjalin dengan baik. Kepala sekolah melaksanakan proses pengawasan/monitoring kegiatan BK yang dilaksanakan oleh Guru BK, serta berdialog dengan Guru BK mengenai kegiatan dan permasalahan yang dihadapi.

- f. Kerjasama dalam memberi kesempatan kepada Guru BK untuk mengembangkan potensi/profesionalitasnya

Kerjasama Guru BK dengan kepala sekolah dalam memberi kesempatan kepada Guru BK untuk mengembangkan potensi/profesionalitasnya terjalin dengan baik. Kepala sekolah memberikan kesempatan kepada Guru BK dalam melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan profesionalitas dan potensi yang dimiliki melalui MGBK dan seminar BK.

2. Kerjasama Guru BK dengan Wakil Kepala Sekolah

- a. Kerjasama dalam mensosialisasikan BK di sekolah

Kerjasama Guru BK dengan wakil kepala sekolah dalam mensosialisasikan BK di sekolah belum terjalin dengan baik. Sosialisasi mengenai BK di SMAN 4 Kerinci hanya dilaksanakan oleh Guru BK.

- b. Kerjasama dalam mengkoordinir pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling kepada semua personel sekolah

Kerjasama Guru BK dengan wakil kepala sekolah dalam mengkoordinir pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling kepada semua personel sekolah belum terjalin. Kegiatan BK tidak terkoordinasi kepada semua personel sekolah, sehingga kurangnya peran aktif personel sekolah untuk ikut melaksanakan kegiatan BK.

- c. Kerjasama dalam merealisasikan kebijakan pemimpin sekolah terutama dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling

Kerjasama Guru BK dengan wakil kepala sekolah dalam merealisasikan kebijakan pemimpin sekolah terutama dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling terlaksana dengan baik. Meski pelaksanaan kebijakan tersebut kurang menguntungkan bagi pelaksanaan kegiatan BK.

3. Kerjasama Guru BK dengan Guru Mata Pelajaran

- a. Kerjasama dalam mengidentifikasi siswa yang memerlukan bimbingan

Kerjasama Guru BK dengan guru mata pelajaran dalam mengidentifikasi siswa yang memerlukan bimbingan belum terjalin. Guru BK belum melaksanakan proses identifikasi terhadap siswa, serta belum terjalinnya komunikasi yang baik antara guru mata pelajaran dengan Guru BK di SMAN 4 Kerinci dalam melaksanakan proses identifikasi terhadap siswa.

- b. Kerjasama dalam mengalih tangankan siswa yang memerlukan bimbingan kepada Guru BK

Kerjasama Guru BK dengan guru mata pelajaran dalam mengalih tangankan siswa yang memerlukan bimbingan kepada Guru BK belum terjalin, guru mata pelajaran menyelesaikan permasalahan siswa dengan metode sendiri tanpa melibatkan Guru BK dalam menangani kasus tersebut.

- c. Kerjasama dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh layanan dari Guru BK

Kerjasama Guru BK dengan guru mata pelajaran dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh layanan dari Guru BK kurang terjalin dengan baik. Belum ada komunikasi yang terjalin antara Guru BK dengan guru mata pelajaran, meskipun demikian guru mata pelajaran akan memberikan kesempatan kepada siswa jika siswa menginginkan/ memerlukan layanan dari Guru BK.

- d. Kerjasama dalam kegiatan konferensi kasus

Kerjasama Guru BK dengan guru mata pelajaran dalam kegiatan konferensi kasus belum terjalin. Kegiatan konferensi kasus belum pernah diadakan oleh Guru BK di kelas dengan melibatkan siswa dan guru mata pelajaran.

- e. Kerjasama dalam pengumpulan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian layanan bimbingan dan konseling

Kerjasama Guru BK dengan guru mata pelajaran dalam pengumpulan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian layanan bimbingan dan konseling belum terjalin. Belum adanya informasi yang diberikan guru mata pelajaran untuk penilaian layanan, serta belum adanya komunikasi antara Guru BK dengan guru mata pelajaran dalam mengumpulkan informasi untuk penilaian layanan.

4. Kerjasama Guru BK dengan Wali Kelas

- a. Kerjasama dengan Guru BK dalam melaksanakan layanan dan kegiatan pendukung di kelas yang menjadi tanggung jawabnya

Kerjasama Guru BK dengan wali kelas dalam melaksanakan layanan dan kegiatan pendukung di kelas belum terjalin. Belum terlihat pelaksanaan kegiatan layanan maupun kegiatan pendukung di kelas yang di adakan oleh Guru BK dengan melibatkan wali kelas, hal ini diperkuat dengan tidak adanya dokumentasi mengenai tentang pelaksanaannya.

- b. Kerjasama dalam memberikan kesempatan dan waktu kepada siswa untuk mengikuti kegiatan BK

Kerjasama Guru BK dengan wali kelas dalam memberikan kesempatan dan waktu kepada siswa untuk mengikuti kegiatan BK belum terjalin dengan baik. Wali kelas akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendapatkan layanan BK apabila siswa memerlukan layanan tersebut, namun belum ada komunikasi yang terjalin dalam hal ini.

- c. Kerjasama dengan Guru BK dalam mengumpulkan informasi tentang siswa di kelasnya untuk memperoleh pelayanan dari Guru BK

Kerjasama Guru BK dengan wali kelas dalam mengumpulkan informasi tentang siswa di kelasnya untuk memperoleh pelayanan dari Guru BK belum terjalin. Belum ada komunikasi yang terjalin antara Guru BK dengan wali kelas untuk mengumpulkan informasi dalam rangka penilaian layanan bimbingan dan konseling.

- d. Kerjasama dengan Guru BK dalam kegiatan konferensi kasus

Kerjasama Guru BK dengan wali kelas dalam kegiatan konferensi kasus belum terjalin. Kegiatan konferensi kasus belum pernah diadakan oleh Guru BK di kelas dengan melibatkan siswa dan wali kelas. Belum pernah terlihat Guru BK melaksanakan kegiatan konferensi kasus di kelas, serta tidak adanya dokumentasi mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut.

- e. Kerjasama dengan Guru BK dalam memberikan informasi kepada guru mata pelajaran tentang siswa yang perlu diperhatikan secara khusus

Kerjasama Guru BK dengan wali kelas dalam memberikan informasi kepada guru mata pelajaran tentang siswa yang perlu diperhatikan secara khusus belum terjalin. Belum ada pemberian informasi yang dilakukan oleh Guru BK kepada guru mata pelajaran menyangkut siswa yang memerlukan perhatian khusus.

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kegiatan Layanan Bimbingan dan Konseling oleh Guru BK di SMAN 4 Kerinci

Pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan dan konseling oleh Guru BK di SMAN 4 Kerinci belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa temuan lapangan seperti: (1) tidak adanya sarana pengolahan AUM yang dapat dioperasikan seperti komputer, CPU, buku AUM format SLTA dan lembar jawaban AUM, (2) belum diberikannya jam masuk kelas untuk melaksanakan layanan oleh Guru BK, (3) tidak terlaksananya program BK yang telah dirancang, hal ini diperkuat dengan tidak adanya dokumen pelaksanaan kegiatan layanan tersebut, (4) kegiatan evaluasi, analisis dan tindak lanjut layanan belum terlaksana karena terkendala belum adanya kegiatan layanan BK yang dilaksanakan oleh Guru BK, (5) laporan kegiatan BK yang dibuat berisi rancangan program BK dan uraian dari setiap bentuk layanan yang akan diberikan. Tidak ditemukan dalam laporan tersebut bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan seperti lapelprog dan sebagainya.

Pelaksanaan kegiatan BK yang ideal diawali dengan need assessment yang baik sebagai acuan untuk perencanaan program yang efektif. Pelaksanaan studi kebutuhan (need assessment) yang belum memenuhi standar sebagaimana semestinya menjadikan perancangan program BK di SMAN 4 Kerinci kurang efektif.

Mengenai pelaksanaan need assessment di SMAN 4 Kerinci, kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan pengamatan langsung oleh Guru BK terhadap siswa di lapangan. Dengan kata lain need assessment didasarkan pada permasalahan yang nampak di lapangan dan permasalahan-permasalahan umum yang sering terjadi atau permasalahan yang bersifat insidental.

Selain menyangkut need assessment dan perencanaan program BK, pihak sekolah belum memberikan waktu untuk pelaksanaan layanan BK di kelas yang seharusnya jam pemberian layanan tersebut tercantum dalam roster/daftar pelajaran. Tidak adanya jam masuk kelas yang diberikan oleh pihak sekolah tampak mempengaruhi kinerja Guru BK dalam melaksanakan kegiatan layanan kepada siswa.

Tidak adanya jam untuk pemberian layanan di kelas, juga terlihat mempengaruhi kepercayaan diri Guru BK menyangkut dengan eksistensinya sebagai pendidik di sekolah tersebut. Turunnya eksistensi Guru BK secara tidak langsung akan mempengaruhi interaksi Guru BK dengan personel sekolah lainnya serta interaksi Guru BK dengan peserta didik.

Berdasarkan temuan di lapangan sosialisasi mengenai BK yang dilakukan di SMAN 4 Kerinci masih sangat kurang di lakukan oleh Guru BK, bahkan terbilang belum efektif. Hal ini tentu akan berdampak pada persepsi personel sekolah terhadap BK, yang berkemungkinan besar berpengaruh terhadap dukungan personel sekolah terhadap Guru BK di sekolah tersebut. Mengenai hal ini Robert L. Gibson dan Marianne H. Mitchell (2011:529) mengungkapkan guru dan semua pihak tidak akan mencari atau menerima konselor jika mereka tidak melihat ada nilai atau manfaat dari bantuan/layanan yang diberikan, meskipun disetiap situasi Guru BK tetap harus mengkomunikasikannya dan sanggup membuktikan perannya sebagai konsultan yang efektif.

Berdasarkan temuan di lapangan, motivasi Guru BK untuk berupaya melakukan kegiatan layanan yang masih mungkin dilaksanakan di luar kelas terkesan menurun. Hal ini dikarenakan menurunnya kepercayaan diri dan eksistensi Guru BK karena tidak adanya jam layanan BK yang diberikan oleh pihak sekolah kepada Guru BK untuk memberikan layanan di kelas.

Kegiatan layanan BK yang belum terlaksana menjadikan laporan kegiatan yang disusun oleh Guru BK di SMAN 4 Kerinci tidak sesuai dengan acuan/memenuhi standar yang ditetapkan. Berdasarkan pengamatan,

laporan tersebut berisikan pemaparan tentang rancangan program BK dan uraian dari setiap bentuk layanan yang akan diberikan. Tidak ditemukan dalam laporan tersebut bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan seperti lapelprog dan sebagainya.

Laporan dalam kegiatan BK merupakan bukti fisik yang harus dimiliki oleh setiap Guru BK sebagai bukti pelaksanaan kegiatan layanan BK di sekolah. Laporan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban dari setiap kegiatan layanan dan kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan oleh Guru BK. Seyogyanya laporan BK juga memuat tentang bagaimana kegiatan yang telah dilaksanakan terhadap peserta didik, bukan sekedar perencanaan program dan uraian dari bentuk-bentuk layanan yang akan dilaksanakan.

Dari berbagai temuan di atas terlihat bahwa, Guru BK SMAN 4 Kerinci belum profesional dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Prayitno (1999:8) menyatakan Guru BK adalah guru yang ditugaskan melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Guru BK bertanggung jawab untuk merencanakan dan menindaklanjuti kegiatan bimbingan dan konseling terhadap siswa yang menjadi tanggung jawabnya. Lebih luas Prayitno, Mungin Eddy Wibowo, Marjohan, Heru Mugiarto dan Ifdil (2013:103) menjelaskan, masing-masing Guru BK wajib bekerja dalam keseluruhan spektrum program pelayanan bimbingan dan konseling untuk semua peserta didik yang menjadi tugas asuhan/ampuannya. Kegiatan Guru BK dalam spektrum program pelayanan bimbingan dan konseling tersebut dilaksanakan dengan mengikuti tahap-tahap kegiatan Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Monitoring, dan Tindak lanjut (P3M-T).

Keterbatasan sarana dan waktu seyogyanya tidak menjadikan kegiatan BK menjadi pasif, dan bukan berarti kegiatan BK tidak bisa dilaksanakan dengan adanya keterbatasan tersebut, justru disinilah keprofesionalan Guru BK diuji untuk tetap konsisten melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin. Sebagaimana yang di jelaskan oleh Prayitno (1997: 30-34) tugas Guru BK, (1) memasyarakatkan kegiatan bimbingan dan konseling, (2) merencanakan program bimbingan dan konseling, (3) melaksanakan persiapan kegiatan bimbingan dan konseling, (4) melaksanakan layanan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah siswa yang menjadi tanggung jawabnya minimal sebanyak 150 orang siswa (setara dengan 18 jam pelajaran seminggu), (5) melaksanakan kegiatan pendukung bimbingan, (6) menilai proses dan hasil kegiatan layanan bimbingan dan konseling, (7) menganalisis hasil penilaian, (8) melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil analisis penilaian, (9) mengadministrasikan kegiatan bimbingan dan konseling (10) mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatan kepada koordinator Guru BK.

2. Kerjasama Guru BK dengan Personel Sekolah dalam Melaksanakan Layanan BK di SMAN 4 Kerinci

a. Kerjasama Guru BK dengan Kepala Sekolah

Kepala sekolah memiliki peranan penting sebagai pengambil kebijakan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran serta bimbingan dan konseling di sekolah. Setiap kebijakan yang diambil akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses pembelajaran dan pelayanan BK di sekolah.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, kerjasama Guru BK dengan kepala sekolah dalam kegiatan BK belum berjalan dengan optimal, hal ini dapat dilihat dari berbagai temuan di lapangan menyangkut kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah seperti: (1) tidak adanya anggaran untuk melengkapi sarana BK yang dibutuhkan oleh Guru BK, (2) tidak adanya jam untuk pemberian layanan oleh Guru BK di kelas, (3) evaluasi terhadap kegiatan layanan BK di SMAN 4 Kerinci belum dilaksanakan dengan baik.

Menyangkut dengan kebijakan ini, Guru BK dalam wawancara dengan peneliti mengaku tidak pernah dilibatkan atau diminta untuk berkomunikasi dengan kepala sekolah sebelum kebijakan ini di putuskan. Kebijakan menyangkut hal yang isensial, seperti tidak adanya jam pelayanan BK di kelas, kepala sekolah tidak melibatkan personel sekolah yang terkait dalam mengkomunikasikan hal tersebut. Seyogyanya sebelum diputuskan kepala sekolah berkomunikasi dengan Guru BK untuk mempertimbangkan dampak pengambilan kebijakan terhadap pelayanan BK di sekolah. Disamping itu, kepala sekolah semestinya juga melaksanakan evaluasi terhadap kinerja dan pelaksanaan BK di sekolah dengan baik setelah kebijakan ini dilaksanakan, sehingga jelas langkah apa yang akan diambil untuk tindak lanjut pelaksanaan layanan BK.

Memberi dukungan dan bekerjasama dengan Guru BK sudah menjadi kewajiban kepala sekolah, hal ini juga merupakan tanggung jawab kepala sekolah terhadap pelaksanaan kegiatan BK di sekolah yang dipimpinnya, sebagaimana yang dijelaskan jelas dalam Permendikbud Nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Pasal 5 poin (d) menyebutkan pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan tanggung jawab bersama antara kepala satuan pendidikan, Guru BK, dan pendidik lainnya dalam satuan pendidikan.

Sementara kerjasama yang terjalin antara Guru BK dengan kepala sekolah melalui wawancara dan observasi yang peneliti lakukan antara lain, (1) kerjasama dalam berkonsultasi mengenai kesulitan dan hambatan dalam pelaksanaan BK, (2) melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan Guru BK di lapangan, (3) bekerjasama dalam memberikan kesempatan kepada Guru BK dalam mengembangkan potensi yang dimiliki, melalui kegiatan MGBK dan seminar BK.

Dari berbagai pemaparan yang telah di jelaskan terlihat, kerjasama kepala sekolah dalam kegiatan BK belum sepenuhnya terpenuhi, menurut Riska Ahmad (2013:143) sebagai penanggung jawab kegiatan pendidikan secara menyeluruh di sekolah, kepala sekolah seharusnya bekerjasama dengan Guru BK dalam, (1) mengkoordinasikan segenap kegiatan yang diprogramkan di sekolah, (2) menyediakan sarana prasarana, tenaga, dan berbagai kemudahan bagi terlaksananya bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien, (3) melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap program layanan bimbingan dan konseling, (4) mempertanggung jawabkan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah kepada pihak-pihak yang menjadi atasannya (kepala dinas pendidikan).

b. Kerjasama Guru BK dengan Wakil Kepala Sekolah

Berdasarkan temuan di lapangan, Guru BK dan wakil kepala sekolah, terlihat hubungan kerjasama antara Guru BK dan wakil kepala sekolah dalam mensosialisasikan BK belum terjalin dengan sepenuhnya, wakil kepala sekolah hanya memberikan kesempatan untuk pelaksanaan sosialisasi terhadap BK, meski demikian wakil kepala sekolah tidak berperan dalam melaksanakan sosialisasi terhadap BK di sekolah tersebut. Proses sosialisasi BK di SMAN 4 Kerinci hanya dilakukan oleh Guru BK di setiap rapat majelis guru dengan waktu yang sangat terbatas, selebihnya sosialisasi terhadap BK tidak dilaksanakan dalam keseharian kegiatan di sekolah. Dengan demikian, tentunya sosialisasi yang dilakukan tersebut kurang efektif bila ditinjau dari kualitas dan kuantitasnya.

Berdasarkan temuan di lapangan, terlihat belum ada kerjasama yang dilakukan wakil kepala sekolah dalam pengkoordiniran kegiatan BK di SMAN 4 Kerinci. Kegiatan BK tidak terkoordinasi kepada semua personel sekolah sehingga kurangnya peran aktif personel sekolah untuk ikut melaksanakan kegiatan BK.

Seyogyanya semua personel sekolah dilibatkan sesuai dengan peran dan tanggungjawabnya masing-masing dalam kegiatan BK, sehingga dengan kerjasama dan dukungan tersebut pelaksanaan layanan BK diharapkan berjalan dengan optimal. Tohirin (2007:276) menyatakan, Guru BK tidak mungkin bekerja sendiri dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa di sekolah. Guru BK akan memerlukan orang lain dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling. Dengan kata lain pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah melibatkan banyak orang. Untuk itu harus ditentukan dan disusun para personalia atau orang-orang yang terlibat dalam layanannya agar pelaksanaannya efektif dan efisien sehingga tujuannya dapat tercapai dengan efektif dan efisien pula.

Menyangkut dengan kebijakan kepala sekolah tentang BK di sekolah tersebut seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, kerjasama Guru BK dengan wakil kepala sekolah dalam melaksanakan kebijakan kepala sekolah tersebut telah terjalin dengan baik, namun pelaksanaan kebijakan tersebut kurang menguntungkan bagi pelaksanaan kegiatan BK. Meski demikian, kebijakan tersebut tetap dilaksanakan oleh wakil kepala sekolah dan Guru BK.

Berdasarkan temuan di lapangan, kerjasama Guru BK dengan wakil kepala sekolah dalam melaksanakan kegiatan BK dinilai masih kurang efektif. Wakil kepala sekolah belum sepenuhnya bekerjasama dengan Guru BK dalam menjalankan perannya dalam kegiatan BK. Prayitno (1997: 30-34) mengemukakan bahwa seharusnya wakil kepala sekolah bekerjasama dengan Guru BK dalam; (1) mengkoordinasikan pelaksanaan

layanan bimbingan dan konseling kepada semua personel sekolah, (2) pelaksanaan kebijakan pemimpin sekolah terutama dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, (3) melaksanakan bimbingan dan konseling terhadap minimal 75 siswa, bagi wakil kepala sekolah yang berlatar belakang bimbingan dan konseling.

c. Kerjasama Guru BK dengan Guru Mata Pelajaran

Hampir setiap hari guru mata pelajaran berinteraksi dengan siswa di kelas, hal ini menjadikan guru mata pelajaran memahami bagaimana keadaan siswa yang mengikuti mata pelajarannya. Kerjasama yang baik antara guru mata pelajaran dengan Guru BK akan sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan BK di sekolah.

Berdasarkan temuan di lapangan terlihat, kerjasama Guru BK dengan guru mata pelajaran dalam melaksanakan kegiatan layanan masih belum terjalin dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari temuan lapangan seperti, (1) Proses identifikasi terhadap siswa masih dilakukan sepihak oleh guru mata pelajaran dan tidak dikomunikasikan kepada Guru BK, (2) menurunnya kepercayaan guru mata pelajaran untuk mengalih-tangankan kasus siswa kepada Guru BK, (3) kurangnya komunikasi untuk melibatkan siswa dalam pelaksanaan layanan, (4) pelaksanaan kegiatan konferensi kasus di kelas belum terlaksana, (5) pengumpulan informasi untuk penilain layanan BK di SMAN 4 Kerinci belum terjalin dengan baik.

Mengenai identifikasi terhadap siswa, guru mata pelajaran memiliki metode tersendiri seperti dengan memperhatikan tingkah laku, sikap belajar dan motivasi belajar siswa. Sayangnya setelah identifikasi ini dilaksanakan, guru mata pelajaran tidak mengkomunikasikannya dengan Guru BK, tapi diproses dengan metode sendiri. Sementara Guru BK juga tidak meminta informasi atau berkomunikasi dalam hal ini dengan guru mata pelajaran.

Penangan siswa yang bermasalah di sekolah juga dilaksanakan dengan sendirinya oleh guru mata pelajaran, belum ada kerjasama yang dilakukan untuk mengalih-tangankan siswa kepada Guru BK. Sementara Guru BK masih terkesan pasif menyikapi penangan siswa yang bermasalah oleh guru mata pelajaran.

Selanjutnya, berdasarkan temuan di lapangan terlihat, kesediaannya untuk memberikan waktu dan kesempatan kepada siswa bila ingin melaksanakan layanan atau kegiatan BK. Namun, dari pihak Guru BK sendiri belum aktif memberikan layanan kepada peserta didik, karena Guru BK masih terfokus untuk mengupayakan pengadaan sarana dan pemberian waktu layanan BK di kelas.

Begitu juga halnya dengan pelaksanaan konferensi kasus, Guru BK dan guru mata pelajaran belum bekerjasama dalam hal ini, sehingga pelaksanaan konferensi kasus yang seyogyanya bisa mendukung pelaksanaan kegiatan BK tersebut hingga saat ini belum terlaksana. Hal ini tentu dikarenakan belum adanya komunikasi yang terjalin antara keduanya.

Bila dilihat dari penjelasan di atas, menyangkut kerjasama dalam pengumpulan informasi untuk penilaian layanan BK sudah tentu tidak terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Kurangnya interaksi dan komunikasi antara Guru BK dengan guru mata pelajaran menjadikan pengumpulan informasi tersebut belum terlaksana.

Dalam pelaksanaan kegiatan BK, kerjasama antara Guru BK dengan guru mata pelajaran sangat dibutuhkan, mengingat guru mata pelajaran memiliki peranan yang penting dalam kegiatan BK. Mengenai keterlibatan dan kerjasama guru mata pelajaran dalam pelaksanaan kegiatan BK di sekolah, Prayitno (1997:33) memaparkan bahwa guru mata pelajaran seyogyanya bekerjasama dengan Guru BK dalam, (1) membantu memasyarakatkan bimbingan dan konseling kepada siswa, (2) bekerjasama dengan Guru BK mengidentifikasi siswa yang memerlukan bimbingan, (3) mengalih-tangankan siswa yang memerlukan bimbingan kepada Guru BK, (4) mengadakan upaya tindak lanjut layanan bimbingan dan konseling, (5) memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh layanan dari Guru BK, (6) ikut serta dalam program layanan bimbingan dan konseling (misalnya konferensi kasus), (7) membantu pengumpulan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian layanan bimbingan dan konseling.

d. Kerjasama Guru BK dengan Wali Kelas

Wali kelas merupakan guru yang paling sering berinteraksi dengan siswa di sekolah, terutama dengan siswa di kelas yang menjadi ampunya. Menimbang hal tersebut maka dalam hal ini akan sangat efektif apabila Guru BK dapat berinteraksi dan bekerjasama dengan wali kelas dalam memberikan pelayanan BK yang optimal kepada siswa.

Berdasarkan data di lapangan, ditemukan bahwa kerjasama Guru BK dengan wali kelas masih menemui kendala. Hal ini terlihat dari, (1) belum adanya pelaksanaan layanan dan kegiatan pendukung yang dilaksanakan di kelas, (2) belum terjalannya komunikasi yang efektif antara guru BK dengan wali kelas untuk pemberian layanan kepada siswa, (3) belum terlihat kerjasama antara Guru BK dengan wali kelas dalam mengumpulkan informasi menyangkut layanan BK, (4) kegiatan konferensi kasus belum pernah dilaksanakan oleh Guru BK dan wali kelas, (5) belum terjalin kerjasama Guru BK dengan wali kelas dalam memberikan informasi kepada guru mata pelajaran tentang siswa yang perlu diperhatikan secara khusus.

Berdasarkan observasi menyangkut kerjasama Guru BK dengan wali kelas dalam pelaksanaan kegiatan pendukung, tidak ditemukan arsip atau dokumen tentang pelaksanaan kegiatan tersebut. Dari pengamatan yang dilakukan dengan wali kelas diperoleh penjelasan bahwa kegiatan pendukung memang tidak pernah dilaksanakan di sekolah oleh Guru BK, hal ini juga dibenarkan oleh Guru BK yang menyatakan bahwa kegiatan layanan dan kegiatan pendukung belum terlaksana sebagaimana mestinya dikarenakan belum diberikannya waktu untuk pelaksanaan BK di kelas.

Menyangkut pemberian kesempatan kepada siswa untuk mengikuti layanan BK, wali kelas akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk melaksanakan layanan BK bila dibutuhkan oleh siswa. Sementara kegiatan BK belum aktif di sekolah, hal ini menjadikan kurangnya minat siswa untuk mendapatkan layanan dari Guru BK.

Disamping penjelasan yang telah dikemukakan di atas, ditemukan juga bahwa pengumpulan informasi mengenai keadaan peserta didik untuk acuan pelaksanaan layanan belum dilaksanakan oleh Guru BK, padahal wali kelas melakukan identifikasi terhadap masalah siswa dikelasnya, selanjutnya wali kelas melaksanakan proses penyelesaian masalah dengan metode sendiri. Tidak adanya kerjasama yang baik dalam hal ini disinyalir karena tidak terjalannya komunikasi yang efektif antara Guru BK dan wali kelas.

Begitu juga halnya dengan pelaksanaan konferensi kasus, dikarenakan tidak adanya komunikasi yang efektif maka kerjasama Guru BK dengan wali kelas dalam kegiatan ini belum terlaksana. Persoalan ini salah satunya berimbas pada tanggungjawab wali kelas dan Guru BK untuk mengkomunikasikan siswa yang perlu mendapat perhatian khusus kepada guru mata pelajaran. Berdasarkan wawancara dengan guru mata pelajaran, diperoleh keterangan bahwa belum pernah wali kelas maupun Guru BK memberi informasi mengenai siswa yang perlu mendapat perhatian khusus.

Minimnya sosialisasi tentang BK dan komunikasi yang tidak terjalin dengan baik antara Guru BK dengan wali kelas merupakan akar dari persoalan ini. Seharusnya setiap Guru BK harus bersosialisasi dengan personel sekolah serta menjalin komunikasi yang baik mengenai keadaan peserta didik. Padahal apabila Guru BK mampu menjalin komunikasi yang baik dengan wali kelas, banyak hal yang dapat dilaksanakan dengan bekerjasama dengan wali kelas sebagaimana yang diungkapkan oleh Prayitno (1997:34), bahwa wali kelas dapat bekerjasama dalam; (1) membantu Guru BK melaksanakan layanan yang menjadi tanggung jawabnya (2) membantu memberikan kesempatan dan kemudahan dari siswa, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya, mengikuti layanan bimbingan dan konseling, (3) memberikan informasi tentang siswa di kelasnya untuk memperoleh pelayanan bimbingan dari guru pembimbing, (4) ikut serta dalam konferensi kasus, (5) menginformasikan kepada guru mata pelajaran tentang siswa yang perlu diperhatikan secara khusus.

Berdasarkan pembahasan mengenai pelaksanaan layanan BK di SMANA 4 Kerinci seperti yang telah dipaparkan secara keseluruhan terlihat, pelaksanaan layanan BK di SMAN 4 Kerinci belum terlaksana. Kerjasama Guru BK dengan personel sekolah dalam melaksanakan kegiatan layanan BK belum terjalin dengan baik. Berdasarkan analisa terhadap temuan lapangan terungkap bahwa, belum terselenggaranya

pelaksanaan layanan BK serta kerjasama yang belum terjalin dengan baik antara Guru BK dengan personel sekolah di SMAN 4 Kerinci diduga disebabkan oleh tiga faktor penting yang saling berkaitan yakni, (1) kurangnya perhatian, pemahaman, dan kerjasama dari pihak sekolah terhadap pelaksanaan kegiatan BK, (2) menurunnya eksistensi BK di sekolah, sehingga menurunkan kepercayaan diri dan motivasi Guru BK untuk melaksanakan kegiatan layanan BK di sekolah, (3) kurangnya sosialisasi BK mempengaruhi persepsi dan kepercayaan personel sekolah terhadap kinerja Guru BK.

Berdasarkan temuan lapangan dan pembahasan yang telah dijelaskan mengenai pelaksanaan layanan BK di SMAN 4 Kerinci diperoleh kesimpulan bahwa, “Keadaan sekolah yang kondusif dengan potensi Guru BK yang baik serta jumlah personel yang cukup, ditunjang fasilitas yang memadai untuk melaksanakan layanan BK, jika dalam pelaksanaannya tidak didukung dengan kerjasama yang baik dari personel sekolah lainnya, menjadikan pelaksanaan layanan BK di sekolah tersebut tidak optimal”. Pelaksanaan layanan BK yang optimal di sekolah sangat memerlukan kerjasama/dukungan sistem, sebagaimana yang dijelaskan oleh Thomas Ellis (dalam Mamat Supriatna, 2011:68) dukungan sistem (system support) adalah kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan memantapkan, memelihara, dan meningkatkan program bimbingan secara menyeluruh melalui pengembangan profesional, hubungan masyarakat dan staf, konsultasi dengan guru, staf ahli/penasihat, masyarakat yang lebih luas, manajemen program, penelitian dan pengembangan. Apabila semua kegiatan ini dapat terlaksana dikemudian hari maka diharapkan pelaksanaan kegiatan BK di SMAN 4 Kerinci dapat berjalan dengan efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan layanan BK oleh Guru BK di SMAN 4 Kerinci; (a) pelaksanaan studi kebutuhan (*need assessment*) dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap kondisi siswa di lapangan dan permasalahan umum yang sering terjadi, serta berpedoman kepada rancangan program yang telah sudah, (b) perencanaan program BK dirancang berdasarkan pada kegiatan *need assessment* yang telah dilaksanakan walaupun belum lengkap dan mendalam, (c) pelaksanaan kegiatan layanan BK dan kegiatan pendukung terkendala tidak adanya jam pelayanan BK yang di berikan oleh pihak sekolah untuk melaksanakan layanan di kelas. Meski demikian, Guru BK tetap memberikan kesempatan bagi siswa yang membutuhkan layanan BK untuk mendapatkan pelayanan di ruang konseling, (d) pelaksanaan evaluasi, analisis, dan tindak lanjut terhadap hasil kegiatan layanan belum terlaksana, hal ini dikarenakan masih terkendalanya pelaksanaan program layanan, (e) laporan kegiatan BK belum disusun sesuai dengan standar pelaporan yang semestinya, namun laporan tersebut memuat perencanaan program layanan dan penjelasan terkait dengan proses layanan yang akan diberikan.
2. Kerjasama Guru BK dengan personel sekolah dalam melaksanakan layanan BK di SMAN 4 Kerinci belum terjalin dengan baik. Proses/mekanisme pelaksanaan layanan terkadang dilakukan sepihak tanpa ada dukungan/kerjasama dari pihak lainnya, sehingga pelaksanaannya tidak optimal. Potensi yang dimiliki SMAN 4 Kerinci cukup memadai untuk melaksanakan layanan BK, namun di lapangan dalam pelaksanaan layanan yang dimulai dari *need assessment*, perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, evaluasi, analisis, laporan serta tindak lanjut terhadap hasil layanan belum terlaksana dengan optimal. Bila ditinjau dari kerjasama dalam proses pelaksanaannya, kerjasama Guru BK dengan personel sekolah lainnya belum terjalin dengan baik.

Berdasarkan analisa tentang hal tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa, “Keadaan sekolah yang kondusif dengan potensi Guru BK yang baik serta jumlah personel yang cukup, ditunjang fasilitas yang memadai untuk melaksanakan layanan BK, jika dalam pelaksanaannya tidak didukung dengan kerjasama yang baik dari personel sekolah lainnya, menjadikan pelaksanaan layanan BK di sekolah tersebut tidak optimal”.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan dan implikasi yang telah dikemukakan di atas, ada beberapa saran yang diajukan oleh peneliti yakni sebagai berikut.

1. Kepala sekolah hendaknya bekerjasama dan memberikan dukungan kepada Guru BK dengan memfasilitasi serta memberikan waktu dan kesempatan bagi terlaksananya layanan BK yang optimal di sekolah. Disamping itu, kepala sekolah hendaknya melaksanakan evaluasi terhadap kinerja Guru BK dan pelaksanaan BK di sekolah dengan baik setelah menerapkan kebijakan.
2. Guru BK hendaknya tetap konsisten dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk memberikan layanan kepada peserta didik dengan semaksimal mungkin, meski sarana dan waktu yang diberikan kurang memadai. Disamping itu, Guru BK juga harus melaksanakan sosialisasi tentang BK serta menjalin hubungan kerjasama dan komunikasi yang baik dengan personel sekolah lainnya menyangkut kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah.
3. Guru mata pelajaran dan wali kelas hendaknya memahami peran dan keterlibatannya dalam bekerjasama dengan Guru BK menyangkut kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah, serta berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- Mamat Supriatna. (2011). *Bimbingan dan Konseling Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Jakarta: Depdikbud.
- Prayitno. (1997). *Layanan Konseling untuk Para Pekerja*. Padang: UNP Press.
- Prayitno dan Erman Amti. (1999). *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prayitno, Mungin Eddy Wibowo, Marjohan, Heru Mugiarto dan Ifdil. (2013). *Pembelajaran Melalui Pelayanan BK di Satuan Pendidikan*. Padang: UNP Press.
- Riska Ahmad. (2013). *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Padang: UNP Press.
- Robert L. Gibson dan Marianne H. Mitchell. (2011). *Bimbingann dan Konseling*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tohirin. (2007). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*. Jakarta: Raja Grafindo.